

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN TATA KELOLA KEUANGAN BUM DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Iman Waskito, Lalu Takdir Jumaidi, M. Ali Fikri, Yeni Nirmala
Universitas Mataram

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat

Korespondensi: waskitoiman@gmail.com

Artikel history :	<i>Received</i>	: 15 Juli 2024	DOI : https://doi.org/10.29303/pepadu.v5i3.5967
	<i>Revised</i>	: 25 Juli 2024	
	<i>Published</i>	: 30 Juli 2024	

ABSTRAK

Laporan keuangan merupakan instrument pengukur kinerja setiap entitas bisnis, tidak terkecuali BUM Desa. Tanpa laporan keuangan kinerja BUM Desa tidak dapat dinilai perkembangannya, sehingga setiap penyertaan dana Desa didalamnya sangat beresiko. Rendahnya kemampuan SDM BUM Desa sebagai penyebab tiadanya laporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan penguatan SDM BUM Desa sangat diperlukan untuk menunjang terwujudnya laporan keuangan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menguatkan kemampuan SDM BUM Desa untuk menyusun laporan keuangan. Terdapat 24 BUM Desa yang dipilih sebagai peserta kegiatan pengabdian ini. Kriteria pemilihan tersebut adalah terdata di P3MD Kabupaten Lombok Barat, memiliki kegiatan bisnis, mewakili setiap kecamatan. Hingga selesainya laporan kegiatan pengabdian ini selesai dibuat, masih terdapat kegiatan pendampingan yang terus diberikan oleh tim pengabdian. Karena disadari penyusunan laporan keuangan ini dapat berkelanjutan yang tentunya didalamnya tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan yang penyelesaiannya membutuhkan pendampingan.

Kata Kunci : BUM Desa, Laporan keuangan, Kinerja Keuangan, Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah BUMDesa tergolong sangat pesat. Menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) melalui sistem informasi desa menunjukkan hingga pada November 2018 jumlah BUMDesa di Indonesia mencapai 41.000 unit tersebar di 74.957 desa meningkat menjadi 53.047 BUM Desa pada pertengahan Maret 2023. Pertumbuhan tersebut memang sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui stimulus penyertaan sebagian Anggaran Dana Desa untuk pengembangan BUM Desa. Pertanyaannya kemudian adalah apakah BUMDes sudah siap menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia?. Problematika yang ada adalah banyak data yang menyebutkan bahwa sebagian besar BUM Desa sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang

menghasilkan. Sebagian malah layu sebelum berkembang karena masih sedikitnya pemahaman pengelolaan BUM Desa pada sebagian besar desa (Sarkawi, dkk. 2020).

Mayu & Adlin (2016) serta Sumaryadi & Saputra (2017) mengungkapkan bahwa faktor utama yang menghambat Bumdes adalah kualitas sumber daya manusia. Faktor lainnya adalah kesalahan dalam identifikasi potensi dan pemilihan jenis usaha, kurangnya kesiapan dan kemampuan SDM dalam tata administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban, alokasi modal Bumdes yang kecil dari dana desa serta kurangnya evaluasi kinerja dan audit laporan keuangan (Syncore, 2017). Waskito (2023) menemukan bahwa salah satu problematika BUM Desa adalah konflik kepentingan antara bisnis dan politik. Penunjukan direktur BUM Desa sangat rentan sebagai bentuk imbal jasa politik atas terpilihnya kepada Desa baru. Konflik ini berpotensi mengutamakan balas jasa dari pada kepentingan bisnis BUM Desa. Sehingga berdampak pada kinerja BUM Desa, salah satunya terbengkalainya penyusunan laporan keuangan.

Informasi mengenai problematika BUM Desa juga didapat melalui survei awal melalui dialog bersama ibu Yusmi Zulvia selaku penanggung jawab BUM Desa pada Program Pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Lombok Barat. Ibu Yusmi menguraikan bahwa permasalahan BUM Desa secara umum dan mendasar ada empat, yaitu; kepengurusan, permodalan, menangkap peluang bisnis, dan pelaporan keuangan. Kabupaten Lombok Barat memiliki 119 desa, namun baru sebanyak 53 desa yang memiliki BUM Desa yang berbadan hukum. Kondisi ini menunjukkan keseriusan pengurus BUM Desa dan aparatur Desanya dalam menghidupkan BUM Desa masih sangat perlu ditingkatkan. Penyusunan laporan keuangan ini juga sangat penting untuk mengukur kinerja bisnis, sehingga harus segera dibenahi. Bagaimana mungkin Desa selalu menganggarkan penyertaannya kepada BUM Desa, namun tidak bisa mengukur kinerja bisnisnya, pungkas Ibu Yusmi.

Para ahli (Romney & Steinbart, 2018:10; Mulyadi, 2017:129; IAPI, 2011:319.2) mengatakan sebagai bagian dari unit bisnis, BUM Desa juga perlu memiliki Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Kedua sistem ini saling terkait. SIA berfungsi menghasilkan laporan keuangan, sedangkan SPI memastikan laporan keuangan tersebut dapat diandalkan. Artinya ketersediaan laporan keuangan yang berisi angka-angka saja tidak cukup. Tapi laporan keuangan tersebut juga andal, yaitu angka-angka yang ada didalamnya harus berasal dari kegiatan/transaksi yang dikendalikan untuk kepentingan perusahaan. Karena hanya laporan keuangan yang andal akan efektif untuk proses pengambilan bisnis.

Uraian diatas mengisyaratkan bahwa kendala dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan menjadi masalah krusial. Pengukuran kinerja dan sekaligus program kerja kedepan mustahil dilakukan tanpa ada laporan keuangan. Berawal dari dialog bersama ibu Yusmi diatas, kendala penyusunan laporan keuangan ini dialami sebagian besar BUM Desa di Kabupaten Lombok Barat. Menindaklanjuti kendala tersebut, maka kegiatan pengabdian ini akan mencari solusi dalam menyusun laporan keuangan yang handal.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 6 bulan, yang diawali dengan musyawarah atau diskusi dengan P3MD pada bulan Maret 2024 mengenai penetapan kriteria BUM Desa sasaran. Kemudian dari musyawarah tersebut didapatkan kriteria sebagai berikut;

1. BUM Desa memiliki aktifitas bisnis;
2. BUM Desa memiliki masalah penyusunan laporan keuangan;

3. Setiap kecamatan diwakili oleh 2 – 3 BUM Desa
4. Setiap BUM Desa minimal diwakili oleh 3 pengelola

Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah penyusunan laporan keuangan adalah melaksanakan pelatihan dan pendampingan. Peserta pelatihan dan pendampingan ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Atas dasar kriteria tersebut diperoleh 24 peserta BUM Desa. Kemudian pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok dengan waktu yang berbeda. Pembagian kelompok berdasarkan kedekatan wilayah peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan, dan pendampingan telah diberikan kepada 24 BUM Desa dari sepuluh kecamatan. Jadwal pelaksanaan pelatihan dan pendampingan adalah dengan membagi 24 BUM Desa menjadi 5 kelompok berdasarkan kedekatan wilayah, yaitu sebagai berikut;

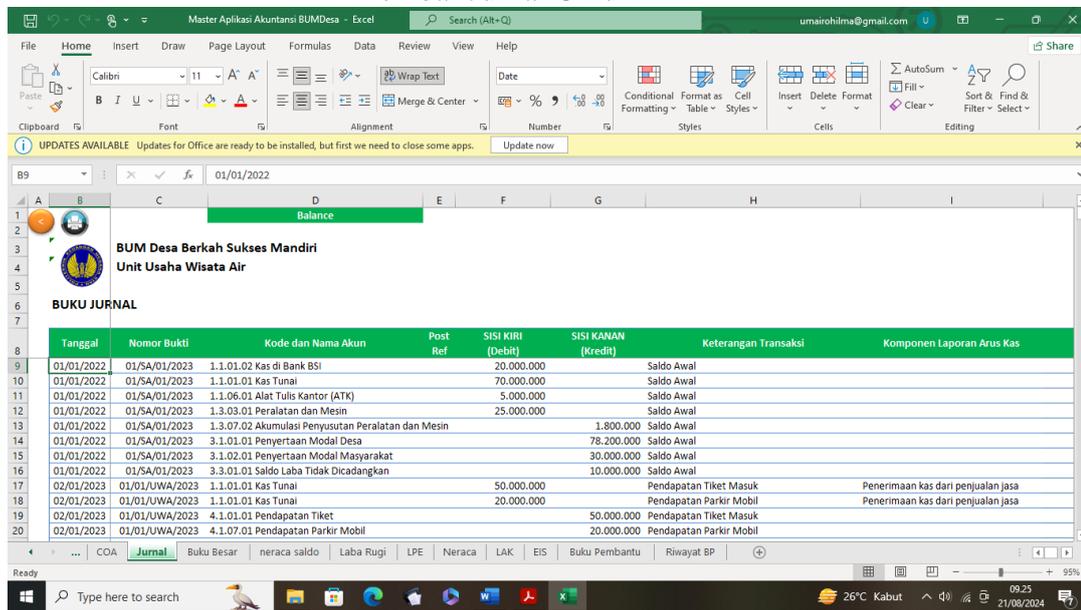
Tabel 5.1
Jadwal Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan

No	BUM Desa Sasaran			Tempat dan Tanggal
	Kecamatan	Desa	Nama BUM Desa	
1	LABUAPI	Kuranji	Uringin Pongsong	Aula Kantor Desa Dasan Baru, 11 Juni 2024
		Labuapi	Beriuk Berkah	
		Bajur	Bajur Berniaga	
	KEDIRI	Dasan Baru	Barokah	
		Banyumulek	Banyu Indah	
2	GERUNG	Beleke	Bale Kekah	Aula Kantor Desa Beleke, 12 Juni 2024
		Mesanggok	Mesanggok Berdikari	
		Gapuk	Rahman Rahim	
	KURIPAN	Jagaraga	Jagak Dirik	
		Kuripan Timur	Sumber Panguripan	
3	NARMADA	Sedau	Karya Mandiri	Aula Kantor Desa Batu Kumbang, 13 Juni 2024
		Selat	Bumi Mas	
		Pakuan	Beriuk Ikhtiar	
	LINGSAR	Butu Kumbang	Ijo Tandır	
		Gontoran	Muda Mandiri	
4	SEKOTONG	Pelangan	Pesopok Langan	Aula Kantor Desa Sekotong Tengah, 19 Juni 2024
		Sekotong Tengah	Siu Karye	
	LEMBAR	Mareje Timur	Maretim Mandiri	
		Eyat Mayang	Mele Maju	
	GUNUNGSARI	Midang	Maju Berkah	Aula Kantor Desa
		Sesela	Maju Bersama	
		Mambalan	Mambalan Mandiri Sejahtera	

5	BATULAYAR	Sandik	Bina Sejahtera	Midang, 20 Juni 2024
		Senggigi	Bangkit	

Pelatihan diberikan dengan metode ceramah penyampaian materi, dan penyelesaian contoh kasus. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi simulasi pencatatan transaksi keuangan. Penyelesaian kasus simulasi akan menambah pemahaman atas praktik pencatatan transaksi keuangan oleh pengelola BUM Desa. Setiap terjadi transaksi keuangan, pengelola BUM Desa diminta untuk menganalisis dampak transaksi tersebut terhadap akun-akun laporan keuangan. Setelah memahami akun-akun laporan keuangan yang terdampak, dilanjutkan dengan proses pencatatan kedalam jurnal umum. Begitu seterusnya hingga pelatihan selesai dilakukan. Dibawah ini diberikan gambaran mengenai aplikasi laporan keuangan yang digunakan oleh BUM Desa.

Gambar 5.1
Lembar Jurnal Umum



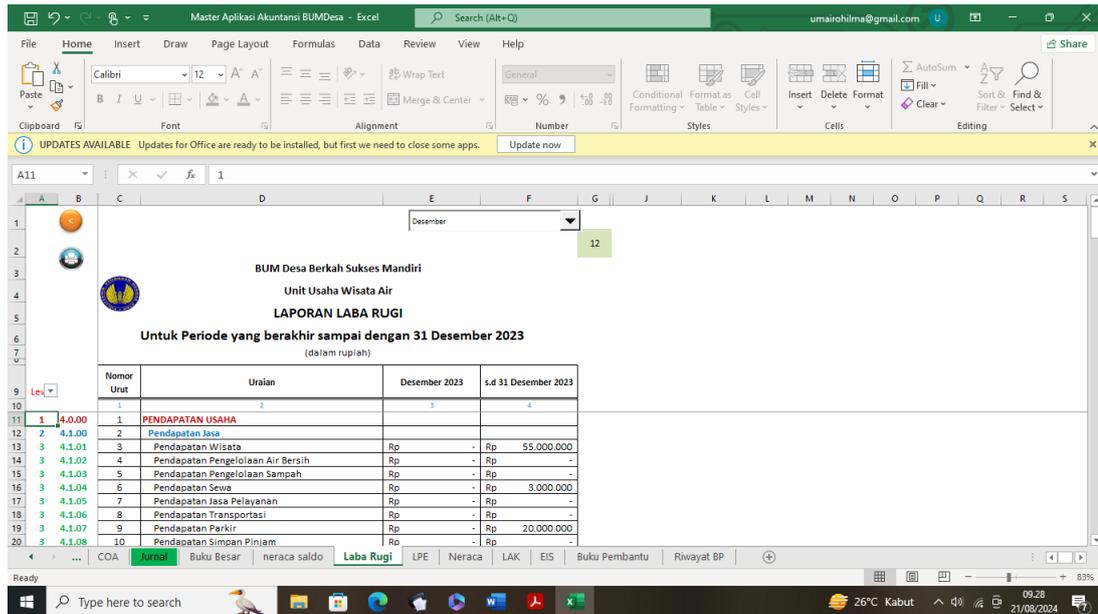
Gambar 5.2
Lembar Neraca Saldo

Kode dan Nama Akun		Saldo		Saldo Akhir	Check	Level 2	Level 3	Level 3	No
		Debit	Kredit						
11 Debit	1 1.1.01.01 Kas Tunai	Rp 70.000.000	Rp -	70.000.000	V	1.1	1.1.01	1.1.01.01	1
12 Debit	2 1.1.01.02 Kas di Bank BSI	Rp 92.000.000	Rp -	92.000.000	V	1.1	1.1.01	1.1.01.02	1
24 Debit	3 1.1.05.01 Persediaan Barang Dagangan	Rp -	Rp -	-		1.1	1.1.05	1.1.05.01	1
28 Debit	4 1.1.06.01 Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 5.000.000	Rp -	5.000.000	V	1.1	1.1.06	1.1.06.01	1
44 Debit	5 1.3.02.01 Kendaraan	Rp 15.000.000	Rp -	15.000.000	V	1.3	1.3.02	1.3.02.01	1
45 Debit	6 1.3.03.01 Peralatan dan Mesin	Rp 25.000.000	Rp -	25.000.000	V	1.3	1.3.03	1.3.03.01	1
49 Kredit	7 1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Rp -	Rp -	-		1.3	1.3.07	1.3.07.01	1
50 Kredit	8 1.3.07.02 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 1.800.000	-		1.3	1.3.07	1.3.07.02	1
67 Kredit	9 2.1.04.01 Utang Listrik	Rp -	Rp -	-		2.1	2.1.04	2.1.04.01	1
76 Kredit	10 3.1.01.01 Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp 78.200.000	78.200.000	V	3.1	3.1.01	3.1.01.01	1
80 Kredit	11 3.1.02.01 Penyertaan Modal Masyarakat	Rp -	Rp 80.000.000	80.000.000	V	3.1	3.1.02	3.1.02.01	1

Gambar 5.3
 Lembar Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
11	1 1.0.001 1 ASET		
12	2 1.1.01 2 Aset Lancar		
13	3 1.1.01 3 Kas	Rp 162.000.000	Rp 90.000.000
14	4 1.1.02 4 Setara Kas	Rp -	Rp -
15	5 1.1.03 5 Piutang	Rp 3.000.000	Rp -
16	6 1.1.04 6 Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -
17	7 1.1.05 7 Persediaan	Rp -	Rp -
18	8 1.1.06 8 Perlengkapan	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
19	9 1.1.07 9 Pembayaran Dimuka	Rp -	Rp -
20	10 1.1.98 10 Aset Lancar Lainnya	Rp -	Rp -
21	3 1.1.99 11 RK Pusat	Rp -	Rp -
22	12 Total Aset Lancar	Rp 170.000.000	Rp 95.000.000

Gambar 5.4
 Lembar Laporan Laba Rugi



Nomor Urut	Uraian	Desember 2023	s.d 31 Desember 2023
1	PENDAPATAN USAHA		
2	Pendapatan Jasa		
3	Pendapatan Wisata	Rp -	Rp 55.000.000
4	Pendapatan Pengelolaan Air Bersih	Rp -	Rp -
5	Pendapatan Pengelolaan Sampah	Rp -	Rp -
6	Pendapatan Sewa	Rp -	Rp 3.000.000
7	Pendapatan Jasa Pelayanan	Rp -	Rp -
8	Pendapatan Transportasi	Rp -	Rp -
9	Pendapatan Parkir	Rp -	Rp 20.000.000
10	Pendapatan Simpan Pinjam	Rp -	Rp -

Pendampingan lanjutan diberikan sesuai kebutuhan setiap BUM Desa, baik secara daring (WA Group) atau luring. Secara berkala tim pengabdian memonitoring perkembangan aplikasi penyusunan laporan keuangan melalui WA Group. Ketika salah satu atau secara berkelompok terdapat BUM Desa yang membutuhkan pendampingan, maka tim pengabdian siap mendampingi. Sejauh ini sudah terdapat beberapa BUM Desa menghubungi dan berdiskusi dengan tim pengabdian melalui *chat* WA. Dan ada juga yang minta bimbingan secara tatap muka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kehadiran peserta menunjukkan kesungguhan mereka untuk berbenah dalam administrasi keuangan. Kesungguhan ini harus dijaga dan dipelihara sehingga terwujud laporan keuangan yang berkelanjutan. Namun demikian, tim pengabdian memiliki keterbatasan untuk memastikan pengelola BUM Desa mampu menyusun laporan keuangan dengan baik. Karena kemampuan menyusun laporan keuangan tidak cukup hanya dengan pemberian pelatihan dan pendampingan, melainkan harus ada komitmen kuat dari pengelola BUM Desa dan pihak terkait lainnya. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat PUED Kemendes PDTT. 2023. *Rekap Bumdes 2023*
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2011). Standar Profesional Akuntan. Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Mayu Indra Welli dan Adlin. 2016. *Faktor-Faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015*. JOM FISIP Vol.3 No.2

Oktober 2016. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

- Mulyadi. 2017. Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2018. Accounting Information. System. Fourteenth Edition. Pearson Education Limit: New Jersey.
- Sarkawi, Abdul Khair, Kafrawi, Zunnuraeni, M. Saleh. 2020. Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol. 5. No. 1. p. 56-73
- Subrata, Hendra Prasetya, Sulistyio Sulistyio, dan Doni Wirshandono Yogivaria (2016). *Faktor Kendala Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kue Nikmat Rasa*. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/index>
- Sumaryadi Nyoman I & Saputra Romi. *The Role of The Village Business Agency As Creative Economic Implementation in Order of Community Empowerment of Villages of Cagak Road Subang District West Java Province*. International Journal of Information Technomogy and Businness Management. ISSN 2304 – 0777. www.jitbm.com. Vol.58 No.1. 15th Dec 2017.
- Syncore, R (2017, April 16). *10 Titik Kritis BUMDes*, Dipetik dari bumdes.id: <http://bumdes.id/blog/2017/04/16/10-titik-kritis-bumdes/>
- Waskito, Iman. 2023. Problematika BUM Desa: Studi Etnometodologi. Laporan Penelitian LPPM Universitas Mataram